

PENDAMPINGAN APARAT DESA DALAM PEMANFAATAN WEBSITE DESA UNTUK MENINGKATKAN FUNGSI SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN SARANA LAYANAN PUBLIK

Suwedy*¹, Cahyaning Raheni², Henni Mande³, Dina Nurlita⁴, Alifurkan⁵, Tanto Widiadna⁶,
Veronika Puspitasari⁷

¹⁻⁷ Universitas Muhammadiyah Palu

*Email: suwedy@unismuhpalu.ac.id

Abstract

This study aims to describe the mentoring of village officials in utilizing the village website to enhance its function in Lumbutarombo Village, Banawa Selatan District, both as an information medium and as a public service platform. The main challenge faced is the limited capacity of village officials in managing and optimally utilizing information technology. Through mentoring activities, officials were provided with training, technical guidance, and hands-on practice in content management, information dissemination, and the use of public service features on the village website. The results show an improvement in the officials' ability to operate the website, an increase in the quality of information delivered to the community, as well as greater transparency and accessibility of public services. Therefore, the utilization of the village website can function effectively as a medium of communication, information, and public services that support a more modern and responsive village governance.

Keyword: Mentoring; Village Website; Information

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendampingan aparat desa dalam pemanfaatan website desa sebagai upaya meningkatkan fungsi desa Lumbutarombo, Kecamatan Banawa Selatan, baik sebagai media informasi maupun sarana layanan publik. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas aparat desa dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Melalui kegiatan pendampingan, aparat desa diberikan pelatihan, bimbingan teknis, serta praktik langsung mengenai pengelolaan konten, penyebaran informasi, dan pemanfaatan fitur layanan publik pada website desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan website, peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, serta terciptanya transparansi dan aksesibilitas layanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, pemanfaatan website desa dapat berfungsi efektif sebagai media komunikasi, informasi, dan layanan publik yang mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan responsif.

Kata Kunci: Pendampingan; Website Desa; Informasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam tata

kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Website desa hadir sebagai sarana strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta penyediaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. (Ikhsan & Adhiatma, 2024) menegaskan bahwa penggunaan website sebagai media informasi di tingkat komunitas mampu mengatasi keterbatasan metode konvensional, seperti papan pengumuman dan rapat rutin, yang seringkali tidak menjangkau seluruh warga. Dengan demikian, pemanfaatan website desa menjadi bagian penting dalam transformasi digital pemerintahan desa.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi website desa belum optimal. Nabilah (2022) menemukan bahwa meskipun website Desa Pulosari telah berfungsi sebagai sarana informasi dan transparansi publik, keterbatasan sosialisasi, sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan mengakibatkan rendahnya pemanfaatan website oleh masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan kapasitas pengguna, khususnya aparat desa, untuk memanfaatkannya secara maksimal.

Penelitian (Bintara et al., 2024) menekankan pentingnya digitalisasi desa melalui pengembangan website profil sebagai sarana komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa website mampu menjadi media efektif dalam menyebarkan informasi sekaligus mempromosikan potensi lokal, sehingga meningkatkan partisipasi warga dan memperkuat pembangunan desa. Dengan kata lain, website desa tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya.

Lebih lanjut, (Romanti et al., 2019) menggarisbawahi bahwa kebijakan pemerintah daerah, seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa, memberikan landasan hukum untuk pengembangan website desa. Namun, implementasinya masih terkendala aspek komunikasi, sumber daya, dan birokrasi, sehingga banyak website desa yang tidak aktif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan saja tidak cukup tanpa adanya pendampingan yang berkesinambungan terhadap aparat desa sebagai pengelola utama sistem informasi.

Dalam konteks tersebut, pendampingan aparat desa menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan website desa. Hasil penelitian (Anam, 2025) menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan mampu meningkatkan keterampilan

aparatus desa dalam mengelola konten digital dan memperluas akses informasi publik. Dengan demikian, pendampingan aparatus desa dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan peran website desa sebagai media informasi dan sarana layanan publik yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teknis pengembangan sistem informasi desa, tulisan ini menekankan pada pendampingan langsung kepada aparatus desa sebagai strategi pemberdayaan. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan aparatus desa dalam mengelola website dan aplikasi, sekaligus memperkuat kesadaran pentingnya digitalisasi desa untuk mendukung tata kelola yang transparan dan efektif.

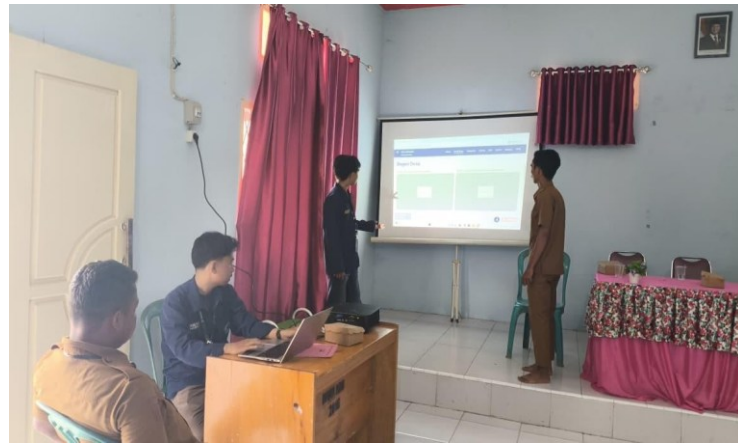
Identifikasi masalah ini penting karena kualitas pengelolaan informasi publik di tingkat desa berpengaruh langsung terhadap keterbukaan informasi, partisipasi warga, serta efektivitas layanan publik. Oleh karena itu, tujuan utama tulisan ini adalah mendeskripsikan proses pendampingan aparatus desa dalam pemanfaatan website dan aplikasi desa sebagai media informasi dan layanan publik, serta menunjukkan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas layanan masyarakat.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan aparatus desa dalam pemanfaatan website desa di Desa Lumbutarombo menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif aparatus desa dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses pelaksanaan dibagi dalam beberapa tahapan utama, yaitu Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan, Perencanaan Program Pendampingan, Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan Teknis, Pendampingan Lapangan dan Monitoring, Evaluasi dan Refleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian bahwa website desa belum sepenuhnya difungsikan sebagai media informasi masyarakat setempat. Menurut salah satu aparatus desa website tersebut telah lama dimiliki namun belum terkelola dengan baik, oleh karena pendampingan pemanfaatan website desa sangat diperlukan sebagai bentuk edukasi media informasi. Adapun hasil pendampingan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Edukasi Terkait Pengerjaan Website Desa

Setelah dilakukan proses edukasi terkait pentingnya website sebagai media informasi publik serta proses pengerjaan website. Proses pengabdian ini melakukan pelaksanaan pembaruan profil desa. Proses pelaksanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Pelaksanaan Pembaruan Profil Desa

Proses pengabdian ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari hasil penelitian yang ada, dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa website desa memiliki peran ganda, yaitu sebagai media informasi publik sekaligus sebagai sarana pelayanan administrasi. Menurut (Riko & Marcus, 2023) membuktikan bahwa penerapan sistem informasi kependudukan berbasis web mampu meningkatkan efisiensi layanan administrasi, mulai dari permohonan surat hingga layanan pengaduan. Hal ini selaras dengan kebutuhan desa-desa di Indonesia, termasuk Desa Lumbutarombo, untuk

menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan.

Selain itu, aspek partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pemanfaatan website desa. Menurut (Bintara et al., 2024) menegaskan bahwa website dapat menjadi media pemberdayaan masyarakat melalui publikasi kegiatan, promosi potensi lokal, dan penyediaan ruang interaksi warga. Ungkapan masyarakat desa Lumbutarombo bapak Erlan dengan adanya website, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai kontributor dalam pembangunan desa baik itu informasi maupun transparansi penggunaan anggaran desa.

Pendampingan yang dilakukan harus bersifat berkelanjutan dan partisipatif. Seperti ditunjukkan oleh (Anam, 2025) pendampingan yang mencakup pelatihan teknis, praktik langsung, dan evaluasi berkala terbukti mampu meningkatkan keterampilan aparat desa. Dengan model pendampingan ini, website desa dapat berfungsi optimal sebagai media komunikasi dan sarana layanan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa website desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi pemerintahan desa. Namun, pemanfaatan ini hanya dapat tercapai apabila aparat desa didampingi secara sistematis dan berkesinambungan. Pendampingan menjadi faktor kunci dalam menghubungkan potensi teknologi dengan kapasitas manusia, sehingga website desa benar-benar berfungsi sebagai instrumen modernisasi tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan inklusif.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan aparat desa dalam pemanfaatan website desa di Desa Lumbutarombo menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus mengoptimalkan fungsi website sebagai media informasi dan sarana layanan publik. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan keterampilan aparat desa dalam mengoperasikan dan memperbarui website secara mandiri serta peningkatan kualitas transparansi informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Saran untuk kepala desa agar dilakukan proses pelatihan sertifikasi profesional dari pihak resmi misalnya BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) kepada aparat yang bertanggungjawab atas informasi digital. Selain itu kepala desa juga perlu menugaskan

aparatus desa secara khusus untuk menangani media digital desa atau memberdayakan pemuda desa lulusan informatika.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. R. *Pendampingan Pengembangan Website Desa sebagai Media Informasi Publik di Desa Sumberejo, Besuki Probolinggo*. 01(02), (2025): 177–189.
- Bintara, C. S., Afifah, F. N., Puteri, M. A., Febrianty, Y., Hartono, T. S., & Adha, F. *Digitalisasi desa melalui website profile sebagai media informasi bagi dusun*. 7(204), (2024): 414–434.
- Ikhsan, M., & Adhiatma, N. *Website Development as a Media for Disseminating Information in RT . 39 Jelutung Village, Jambi City*. 4(1), (2024): 332–339.
- Riko, D., & Marcus, R. D. Peningkatan pelayanan publik pemerintah desa melalui sistem informasi kependudukan berbasis web. *Journal of Information System and Application Development*, 1(1), (2023): 10–18.
- Romanti, V. A., Adriantini, D., Dewi, S., Noviasari, D. T., Magelang, U. M., & Tengah, J. *Good Governance : Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Magelang*. (2019): 161–170.